

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS
TERHADAP PENGUNGKAPAN RESIKO KEUANGAN**

**(Studi Empiris : Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2015-2017)**

SKRIPSI



DI SUSUN OLEH :

**SRI RUKMINI IDAYANTI
1512120136**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG
2019**

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS
TERHADAP PENGUNGKAPAN RESIKO KEUANGAN**

(Studi Empiris : Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2015-2017)

SKRIPSI

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada Jurusan Akuntansi

DI SUSUN OLEH :

SRI RUKMINI IDAYANTI

1512120136



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

BANDAR LAMPUNG

2019



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi atau karya pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Maret 2019

Sri Rukmini Idayanti
NPM.1512120136

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Resiko Keuangan
Nama Mahasiswa : Sri Rukmini Idayanti
No. Pokok Mahasiswa : 1512120136
Program Studi : S1 Akuntansi



Anik Irawati, S.E., M.Sc

NIK. 01170305

HALAMAN PENGESAHAN

**Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi IIB Darmajaya dan dinyatakan diterima
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar**

SARJANA EKONOMI



Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.s., Ph.D
NIK. 14580718

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Maret 2019

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

- a. Nama : Sri Rukmini Idayanti
- b. NPM : 1512120136
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Margorejo, 10 Juli 1996
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Desa Margorejo, Kec. Kotabumi Utara,
Kab. Lampung Utara Rt.007 Rw.003
- f. Suku : Jawa
- g. Kewarganegaraan : Indonesia
- h. E-mail : srirukminiidayanti77@gmail.com
- i. HP : 0822 5809 2617

2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SDN2 Kotabumi Lampung Utara
- b. Sekolah Menengah Pertama : SMPN5 Kotabumi Lampung Utara
- c. Sekolah Menengah Atas : SMKN2 Kotabumi Lampung Utara

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar.

Yang Menyatakan

Bandar Lampung, 14 Maret 2019

SRI RUKMINI IDAYANTI
NPM.1512120136

PERSEMBAHAN

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI UNTUK BAPAK SLAMET DAN IBU KUSMINATUN ORANG TUA TERCINTA YANG SENANTIASA MEMBERIKAN SEGALA CURAHAN KASIH SAYANG, DO'A, NASIHAT, BIMBINGAN, MOTIVASI, DAN PENGORBANAN YANG TAK TERHINGGA SERTA MENJADI PANUTAN SAMPAI SAAT INI. SEMOGA KARYA KECILKU INI MENJADI AWAL KEBANGGAAN BAPAK DAN IBU.

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI UNTUK KAKAK (HERI KUSNANTO DAN AGUS PURNOMO) DAN MBAK IPAR (SUSI DAMAYANTI DAN SUSI LINDA SARI) TERSAYANG YANG SELALU MENDUKUNG DAN MEMBERIKAN MOTIVASI, DAN DO'A YANG DIBERIKAN HINGGA SAAT INI.

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI UNTUK PONAKAN (MAULANA, JAKA, BAINA, BILQIS, ANGGITA) TERSAYANG UNTUK SEGALA SEMANGAT, CANDA DAN TAWA YANG MENGHIBUR DAN MENEMANIKU SELAMA INI.

PENULIS MEMPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI UNTUK SEMUA KELUARGA, SAUDARA, SAHABAT-SAHABAT TERBAIKKU, TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN AKUNTANSI 2015 DAN ORANG TERKASIH YANG SELALU MEMBERIKAN SEMANGAT, DO'A DAN DUKUNGAN.

MOTTO

Pada yang sesungguhnya kesulitan tidak mungkin tidak terselesaikan, dengan terus berusaha, berjuang, dan berdo'a yakin pada diri sendiri pasti segala kesulutan akan terselesaikan

**Melakukan Yang tidak pasti menjadi sebuah kepastian
dengan usaha tanpa keluhan**

KEBAHAGIA ADALAH SEBUAH PILIHAN

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus menciptakannya

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN RESIKO KEUANGAN

(Studi Empiris : Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
Tahun 2015-2017)

Oleh

Sri Rukmini Idayanti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *corporate governance*, profitabilitas terhadap pengungkapan resiko keuangan pada perusahaan keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, jumlah rapat komite audit komposisi komite audit independen, Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 198 Perusahaan Keuangan dengan menggunakan teknik *purposing sampling*. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, asumsi klasik dan regresi linier berganda dan alat yang digunakan program SPSS 20. Hasil pengujian dan pembahasan membuktikan variabel independen ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan sedangkan variabel independen jumlah rapat komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan.

Kata kunci : *Corporate Governance, Financial Risk Disclosure, Pengungkapan Resiko, Profitabilitas, Resiko Keuangan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan YME, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Resiko Keuangan”**. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Darmajaya jurusan akuntansi di perguruan tinggi IIB Darmajaya Bandar Lampung. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. **Bapak Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., MSc** selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
2. **Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, ST., MT** selaku Wakil Rektor I Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
3. **Bapak Ronny Nazar, SE., MM** selaku Wakil Rektor II Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
4. **Bapak Muprihan Thaib, S.Sos.,MM** selaku Wakil Rektor III Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
5. **Bapak Prof. Zulkarnain Lubis, MS., PhD** selaku Wakil RektorIV sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
6. **Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
7. **Ibu Rieka Ramadhaniah, S.E., M.E,Dev., CPA** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
8. **Nolita Yeni Siregar, S.E., Akt, M.Sak., CA** selaku pembimbing atas ketersediannya memberikan waktu untuk membimbing, memberikan

saran, kritik, semangat dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak dan ibu Dosen Pengajar terutama jurusan akuntansi yang telah membagi Ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
10. Bapak (Selamet) Ibu (Kusminatun) tersayang yang selalu mendukung dan memberikan doa, nasihat, motivasi dan pengorbanan cinta yang sangat besar yang diberikan hingga saat ini.
11. Kakak (Heri Kusnanto dan Agus Purnomo) dan Mbak Ipar (Susi Damayanti dan Susi Linda Sari) tersayang yang selalu mendukung dan memberikan motivasi, dan do'a yang diberikan hingga saat ini.
12. Ponakan (Maulana, Jaka, Baina, Bilqis, Anggita) tersayang untuk segala semangat, canda dan tawa yang menghibur dan menemaniku selama ini.
13. Sahabat-sahabat, Indah Purnama Putri, Nur Elistiani, Nyoman Yoyi Lestari, Ana Kasiani, Foresty Ade Witira, Eva Rosmawati, Dira Hardiyanti, Heniyawati yang selama perkuliahan telah mendukung, memberi motivasi do'a dan membantu, menemani setiap saat.
14. Teman-teman seperjuangan bimbingan selama penulisan skripsi, Rani, Resti, Sheni, Rifan, Firda, Yesi, Monicka, Puspita, Indah yang telah berbagi ilmu perkuliahan selama penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan PKPM Desa Gebang Elayanti, Eti Uswatun Hasanah, Ainun Novira Delisa, Ni Made Dewi Adiyawati, Santori, Rama Apriansyah yang telah memberi motivasi dan do'a yang diberikan hingga saat ini
16. Sahabat Alumni SMK Negeri 2 Kotabumi terutama Administrasi Perkantoran 2 yang telah memberi do'a dan motivasi yang diberikan hingga saat ini.
17. Kakak yang terbaik dikosan Anti Baper Squad yang telah memberikan motivasi dan do'a yang diberikan selama ini.
18. Semua pihak yang banyak ataupun sedikit telah membantu penulisan skripsi.
19. Teman-teman angkatan 2015.

20. Almamaterku tercinta IIB Darmajaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan kepada semua pembaca demi kesempurnaan dimasa mendatang. Sehingga bermanfaat untuk kita semua.

BandarLampung, 14 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Sri Rukmini Idayanti

NPM. 1512120136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Teori Agensi	9

2.2 Pengungkapan Resiko Keuangan.....	10
2.3 <i>Corporate Governance</i>	18
2.3.1 Dewan Komisaris	20
2.3.2 Komite Audit.....	22
2.4 Rasio Profitabilitas	23
2.4.1 Pengertian Rasio Profitabilitas	23
2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas.....	25
2.4.3 Pengukuran Rasio Profitabilitas	26
2.5 Penelitian Terdahulu	27
2.6 Kerangka Pemikiran.....	29
2.7 Bangunan Hipotesis	30
2.7.1 Ukuran Dewan Komisaris	30
2.7.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris	30
2.7.3 Komposisi Komisaris Independen	31
2.7.4 Komposisi Komite Audit Independen.....	32
2.7.5 Jumlah Rapat Komite Audit Independen	32
2.7.6 Profitabilitas	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data	35
3.2 Metode Pengumpulan Data	35
3.3 Populasi Dan sampel Penelitian	35
3.3.1 Populasi Penelitian	35
3.3.2 Sampel Penelitian.....	36
3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel	36
3.4.1. Variabel Dependen.....	36
3.4.2. Variabel Independen	37
3.4.2.1. <i>Corporate Governance</i>	37
a. Ukuran Dewan Komisaris.....	37
b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris.....	38
c. Komposisi Komisaris Independen	38

d. Komposisi Komite Audit Independen	38
e. Jumlah Rapat Komite Audit Independen	39
f. Profitabilitas	39
3.5 Metode Analisis Data	39
3.5.1 Statistik Deskriptif	40
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	40
3.5.2.1 Uji Normalitas	40
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	40
3.5.2.3 Uji Autokorelasi	41
3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas	42
3.6. Pengujian Hipotesis	42
3.6.1. Analisis Regresi Linier Berganda	42
3.6.2. Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	43
3.6.3. Uji Statistik F	43
3.6.4. Uji Statistik t	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data	45
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	45
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian	46
4.1.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	46
1. Pengungkapan Resiko Keuangan	46
2. Ukuran Dewan Komisaris	47
3. Jumlah Rapat Dewan Komisaris	47
4. Komposisi Komisaris Independen	48
5. Komposisi Komite Audit Independen	48
6. Jumlah Rapat Komite Audit Independen	48
7. Profitabilitas	49
4.2 Hasil Analisis Data	49
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	49

4.2.1.1. Uji Normalitas	49
4.2.1.2. Uji Multikolinearitas	50
4.2.1.3. Uji Autokorelasi	51
4.2.1.4. Uji Heteroskedastisitas	52
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis	53
4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda	53
4.3.2 Uji Koefisien Determinasi R^2	54
4.3.3 Uji Statistik F	55
4.3.4 Uji Statistik t	56
4.4 Pembahasan	58
4.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris	58
4.4.2 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris	58
4.4.3 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen	59
4.4.4 Pengaruh Komposisi Komite Audit Independen	60
4.4.5 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Independen	60
4.4.6 Pengaruh Profitabilitas	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PenelitianTerdahulu	27
Tabel 3.1	Pengungkapan Resiko	36
Tabel 4.1	Kriteria Sampel	43
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas	47
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	49
Tabel 4.6	Hasil Uji Glejser/Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.7	Hasil Analisis Linier Berganda.....	51
Tabel 4.8	Hail Uji Koefesien Determinasi.....	53
Tabel 4.9	Hasil Uji Statistik F.....	53
Tabel 4.10	Hasil Uji Statistik t.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Sampel Penelitian
- Lampiran 2 Sampel Perusahaan
- Lampiran 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Hasil Pengujian Hipotesis
- Lampiran 6 SK Pembimbing
- Lampiran 7 Form Bimbingan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin ketatnya persaingan bisnis, mendorong setiap perusahaan untuk lebih transparan dalam mengungkapkan informasinya. Semakin banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan maka semakin banyak pula informasi yang perlu diungkapkan harus dapat dipahami, transparan, relevan dan dapat dipercaya, karena informasi tersebut dibutuhkan khususnya pihak investor. Hal tersebut karena kegiatan investasi merupakan kegiatan yang mengandung resiko dan ketidakpastian. Karena terdapat resiko, maka informasi yang disajikan oleh perusahaan diharapkan dapat mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh investor. Maka diperlukanya adanya pengungkapan (*disclosure*) yang memadai (Fathimiyah dkk, 2012).

Pengungkapan (*disclosure*) memberikan implikasi bahwa keterbukaan merupakan publik terhadap manajemen didalam sistem korporasi. Dengan kata lain, kualitas mekanisme *corporate governance* seharusnya dari tingkat keterbukaan atau transparansi (Fathimiyah dkk, 2012). Pengungkapan resiko finansial berkaitan dengan pengungkapan resiko finansial berkaitan dengan pengungkapan mengenai keberadaan resiko, manajemen resiko dan arah kebijakan resiko finansial. Menurut Oorschot (1009), beberapa tahun lalu pengungkapan resiko masih bersifat sukarela, khususnya yang berkaitan dengan instrumen finansial. Ho & Wong (2001) mendefinisika *corporate governance* sebagai cara yang efektif untuk menggambarkan hak dan tanggungjawab masing-masing kelompok *stakeholder* dalam perusahaan dimana transparansi adalah indikator utama standar tata kelola perusahaan dalam sebuah ekonomi. Penerapan *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan informasi perusahaan (Ho & Wong, 2001: Khomsiyah, 2003). Ettredge., et al. (2010) dalam penelitiannya bahwa kualitas *corporate governance* memiliki pengaruh positif dengan kualitas kepatuhan pengungkapan wajib dalam pelaporan keuangan

namun juga perlu pengungkapan informasi-informasi lain yang mampu mempengaruhi pertimbangan para *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan. Pengungkapan risiko merupakan salah satu bagian dari pengungkapan informasi lain dalam pelaporan keuangan yang menyajikan informasi kualitatif dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengungkapan risiko adalah salah satu fakto yang penting dalam pelaporan keuangan perusahaan karena memuat informasi mengenai bagaimana manajemen mengelola risiko serta bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Secara umum, pengungkapan risiko dsajiikan pada bagian *Corporate Governance*. Melalui pengungkapan risiko dalam laporan tahunan, perusahaan menjadi lebih transparan dalam menyajikan informasi kepada seluruh *stakeholdernya*. Perusahaan keuangan memiliki ketentuan yang lebih ketat terkait pengungkapan risiko daripada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketentuan yang membedakan keduanya yaitu selain harus memenuhi ketentuan PSAK 60 dan Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor: Kep-431/BL/2012, perusahaan keuangan juga diwajibkan memenuhi ketentuan minimum pengungkapan seperti yang disyaratkan dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012. Ketentuan lain yaitu perusahaan keuangan diwajibkan mengungkapkan keberadaan komite manajemen risiko, sedangkan perusahaan nonkeuangan hanya sekedar himbauan (Wardhana, 2013).

Pengungkapan risiko merupakan pengungkapan atas risiko-risiko yang telah berhasil dikelola oleh sebuah perusahaan atau pengungkapan atas bagaimana perusahaan dalam mengendalikan risiko yang berkaitan dimasa yang akan datang (Riski,2013). Informasi mengenai risiko perusahaan dapat memberikan manfaat bagi pengguna informasi akuntansi khususnya bagi perusahaan, informasi risiko dapat membantu mengelola perubahan, menurunkan biaya modal bagi alur bisnis perusahaan dimasa mendatang (Mubarok,2013).

Di Indonesia diberitakan Seputar Indonesia 13 Agustus 2012, mengenai kurang dari 20% penurunan kapital yang parah dalam sebuah perusahaan diakibatkan

resiko keuangan sebagai hasil dari kesalahan manajemen resiko, penurunan permintaan inti produk, dan kegagalan mencapai sinergi dari proses akuisisi. Adanya kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat seperti kasus pembobolan bank pada tahun 2011, seperti pada Bank Mandiri, BNI 46, BRI, BII, City Bank, dan BPR Pundi Artha akibat bank mengabaikan resiko dalam bisnis yang dijalani dan tidak menerapkan manajemen resiko dengan baik. Contoh kasus Citibank yang terjadi dan mulai terkuak pada Maret 2011, kasus ini bermula ketika pihak Citibank mendapat aduan dari tiga nasabahnya terkait dengan dana nasabah yang ada ditabung dan menghilang, pihak Citibank melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata terdapat pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan senior yang menjabat sebagai *vice president* di bank tersebut yang bernama Melinda Dee alia Inong Melinda. Kasus kejahatan perbankan di Citibank dinilai ahli hukum Yenti Ganarsih sebagai bukti lemahnya pengawasan bank. Ia mencontohkan, kasus yang dilakukan Melinda sebenarnya tidak akan terjadi jika bank tegas melakukan pemeriksaan (www.tempo.com. 14, Maret 2019).

Penelitian mengenai pengungkapan resiko keuangan merupakan topik yang masih sedikit dibahas. Penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan resiko keuangan di Indonesia diperlukan mengingat pentingnya pengungkapan resiko keuangan, kurangnya penelitian mengenai pengungkapan resiko keuangan, agar pengungkapan resiko dalam laporan tahunan mencukupi kebutuhan informasi para *stakeholders* dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukan adanya *corporate governance* dan profitabilitas. Dewan komisaris adalah inti dari pelaksanaan *good corporate governance* dalam perusahaan (Anggraeni, 2015). Selain itu, dewan komisaris adalah puncak dari sistem pengelolaan internal yang memiliki peranan sangat penting dalam perusahaan. Peran dari dewan komisaris diantaranya yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya transparansi, termasuk didalamnya adalah pengungkapan resiko perusahaan. Rapat dewan komisaris secara potensi merupakan peristiwa penting dalam manajemen

sebuah perusahaan. rapat dapat dijadikan forum untuk menghindari asimetri informasi tentang kondisi perusahaan (Wahyuni, 2012). Abeysekera (2008) menyatakan bahwa *corporate governance* yang di representasikan dengan ukuran dewan komisaris yang besar diharapkan memunculkan perpaduan skill antar anggotanya sehingga berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disampingkan perusahaan termasuk juga berkaitan dengan pengungkapan resiko keuangan.

Menurut FCGI (2011), komponen lain yang mendukung terlaksananya *corporate governance* yang baik, yaitu komite audit. Suhardjanto dan Permatasari (2009) menyatakan bahwa komite audit dipandang sebagai alat menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen termasuk *disclosure*. Semakin independen komite audit, diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan terhadap pengungkapan resiko keuangan. Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan definisi – definisi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang berkerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu, komite audit juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan resiko yang dilakukan karena menunjukkan kepada *stakeholder* mengenai kemampuan perusahaan dalam mengefisienkan penggunaan modal di dalam perusahaannya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi serta diikuti dengan risiko yang tinggi pula, akan terdorong untuk mengungkapkan informasi risiko yang semakin luas. Terdapat hubungan positif antara profitabilitas perusahaan dengan luas pengungkapan risiko, karena manajer perusahaan dalam upaya meningkatkan keuntungan (profitabilitas) akan

memberikan informasi yang lebih luas dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan para investor yang pada gilirannya akan meningkatkan kompensasi yang akan mereka terima (S Singhvi dan Desai, 1971 dalam (Aljifri & Hussainey, 2007).

Penelitian ini merujuk dari penelitian Astawan (2017) Perbedaan penelitian ini yaitu dengan tahun penelitian yang terbaru yaitu 2015-2017 serta menambahkan variabel dari penelitian sebelumnya yaitu profitabilitas dan mengganti entitas dari perusahaan perbankan menjadi perusahaan keuangan. Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa hal, pertama fokus penelitian dilakukan pada perusahaan keuangan (finansial). Selain itu, penelitian mengenai peran *corporate governance* dan profitabilitas dalam pengungkapan resiko keuangan untuk perusahaan keuangan di Indonesia masih sedikit dilakukan. Studi empiris di perlukan untuk membangun pendekatan dalam mengukur kualitas dari pengungkapan resiko. Kedua, terjadinya krisis keuangan tahun 2007. Perhatian terhadap pengungkapan resiko sebagai bentuk pengawasan dan transparasi informasi dalam industri perbankan mengalami peningkatan sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi sebagai *sound basi literature* untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengungkapan resiko keuangan di Indonesia (Oorschot, 2009). Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Resiko Keuangan: Studi Empiris Perusahaan Keuangan Indonesia”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari agar pembahas ini tidak menyimpang dari materi pokoknya penelitian ini mempunyai batasan ruang lingkup yaitu:

1. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh *corporate governance*, profitabilitas terhadap pengungkapan resiko keuangan pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.
2. Variabel dependen yaitu pengungkapan resiko keuangan.

3. Variabel independen yaitu *corporate governance* yang di presentasikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit.
4. Variabel Independen lainnya yaitu profitabilitas (ROE).
5. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang bersumber dari laporan keuangan seluruh perusahaan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen dan telah di publikasi secara lengkap di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada penelitian terdahulu, maka permasalahan yang ingin di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan?
2. Apakah jumlah rapat dewan komisari berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan?
3. Apakah komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan?
4. Apakah komposisi komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan?
5. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan?
6. Apakah ROE berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah jumlah rapat dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan resiko keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah komposisi komisaris independen mempengaruhi tingkat pengungkapan resiko keuangan.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah komposisi komite audit independen mempengaruhi tingkat pengungkapan resiko keuangan.
7. Untuk membuktikan secara empiris apakah jumlah rapat komite audit mempengaruhi tingkat pengungkapan resiko keuangan.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah ROE berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, menjadi referensi bagi penelitian tentang manajemen resiko, khususnya pengungkapan resiko keuangan pada perusahaan keuangan di Indonesia
2. Bagi perusahaan keuangan dan praktisinya, bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang praktik manajemen resiko, khususnya pengungkapan resiko keuangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam praktik penerapan pengungkapan resiko keuangan.
3. Bagi stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan, dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, terutama dalam pengelolaan dan pengungkapan resiko keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber terkait dengan topik penelitian, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang berisi mengenai teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan alat analisis yang digunakan.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang memberikan penjelasan secara singkat objek yang diteliti, deskripsi data yang menjadi materi untuk dianalisa dalam pembahasan.

Bab V : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agency

Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan adalah suatu kontak dimana satu atau lebih (prinsipal) memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agency membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Hal ini yang menjadikan adanya konflik keagenan, konflik keagenan yang terjadi antara agen dan prinsipal dapat diminimalkan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penguatan *corporate governance* (Evianisa & Hermailinda 2014). Pengertian *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (penegelola) perusahaan pemerintah, pihak kreditur, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka Evianisa & Hermailinda (2014).

Teori keagenan merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan (Luayyi, 2010). Informasi adalah salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian, sehingga memberi akuntan peran yang penting dalam membagi resiko antara manajer dan pemilik. Teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar pemahaman dalam praktik pengungkapan resiko. Manajer sebagai pihak agen, memiliki informasi perusahaan yang lebih banyak dan lebih akurat, dibandingkan dengan stakeholder. Informasi tersebut mencakup seluruh kondisi perusahaan, termasuk kondisi – kondisi yang mungkin akan dihadapi perusahaan di masa datang. Pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya memerlukan informasi – informasi tersebut untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Apabila terdapat asimetri informasi antara pihak agen dan principal, maka

keputusan yang diambil bias berdampak buruk dan merugikan berbagai pihak. Manajer seharusnya menjamin ketersediaan informasi yang relevan dan lengkap mengenai resiko yang dihadapi perusahaan, salah satunya dengan menggunakan mekanisme pengungkapan. Kesimpulannya, pengungkapan resiko yang baik akan mengurangi terjadinya asimetri informasi antara pihak agen dan principal (Belkoui2000).

2.2 Pengungkapan Resiko Keuangan

Pengungkapan (*disclosure*) adalah mengkomunikasikan mengenai posisi dari keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, *disclosure* mengandung makna bahwa laporan keuangan harus memberikan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha kondisi keuangan perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan. Resiko keuangan (*financial risk*) merupakan resiko yang timbul karena perusahaan menggunakan sumber dana dengan beban tetap. Penggunaan dana dengan beban tetap tersebut dengan harapan bahwa akan memberikan keuntungan di atas beban tetapnya. Pengungkapan resiko keuangan berkaitan dengan pengungkapan mengenai keberadaan resiko, manajemen resiko dan arah kebijakan resiko finansial. Pengungkapan resiko oleh perusahaan sangat berguna bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan dalam menanamkan saham. Melalui pengungkapan resiko, perusahaan dapat memberikan informasi khususnya informasi mengenai resiko yang terjadi di perusahaan.

Kelengkapan (*comprehensiveness*) yaitu suatu bentuk kualitas. Kualitas pengungkapan dapat digunakan dan diukur untuk menilai manfaat potensial isi suatu laporan keuangan. Menurut Ilham (2010) kelengkapan pengungkapan laporan keuangan sangat bergantung kepada standart yang diberlakukan disuatu Negara. Negara maju dengan regulasi yang lebih ketat relatif tinggi pengungkapan laporan keuangannya jika dibandingkan dengan negara berkembang. Kelengkapan pengungkapan laporan keuangan suatu perusahaan tidak bersifat statis, tetapi

meningkat sejalan dengan perkembangan pasar modal dan sosial dinegara bersangkutan.

Keluasan pengungkapan adalah salah satu bentuk kualitas-kualitas pengungkapan. Menurut Imhoff (Ilham, 2010), kualitas tampak sebagai atribut-atribut yang penting dari suatu informasi akuntansi.

Konsep pengungkapan laporan keuangan menurut Harahap (2009) ada tiga yaitu:

1. Pengungkapan cukup (*adequate disclosure*). Konsep yang sering digunakan adalah pengungkapan cukup, yaitu pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka yang disajikan dapat dipresentasikan dengan benar oleh investor.
2. Pengungkapan wajar (*Fair Disclosure*). Pengungkapan yang wajar secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengguna laporan keuangan, menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. Pengungkapan penuh (*Full Disclosure*). Pengungkapan penuh menyangkut kelengkapan penyajian informasi yang diungkapkan secara relevan. Pengungkapan penuh memiliki kesan penyajian informasi secara melimpah sehingga beberapa pihak melihatnya tidak baik.

Adapun pengelompokan jenis pengungkapan informasi antara lain :

1. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*)
 Pengungkapan wajib adalah pengungkapan minimum yang harus diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan yang telah diatur oleh peraturan pasar modal yang berlaku. Peraturan pengungkapan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur diatur dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang kemudian direvisidengan peraturan Nomor VII.G.7 lampiran SK Ketua BAPEPAM No. 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang berjumlah 73 item tentang penyajian pengungkapan laporan keuangan emiten perusahaan publik.

2. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas untuk membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

A. Penerapan Pengungkapan Resiko di Lembaga Keuangan Perbankan

Di Indonesia ketentuan mengenai wajibnya pengungkapan resiko oleh perbankan secara eksplisit dapat ditentukan mengenai wajibnya pengungkapan resiko oleh perbankan secara eksplisit dapat ditemukan dalam PSAK No. 31 (revisi 2010) tentang Akuntansi Perbankan. Serta diperkuat dengan berlakunya PBI Nomor 5/8/PBI/2003 yang saat ini mengalami perubahan menjadi PBI Nomor 11/25/PBI/2009. Resiko yang harus mencakup dalam pengungkapan laporan keuangan menurut PBI Nomor: 11/25/PBI/2009 adalah:

1. Resiko kredit yaitu Resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Resiko Kredit akibat kegagalan debitur, Resiko Konsentrasi kredit, settlement risk, dan counterparty credit risk.
2. Resiko Pasar yaitu Resiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Resiko perubahan harga option.
3. Resiko Likuiditas yaitu Resiko akibat ketidak mampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4. Resiko Operasional yaitu Resiko akibat ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kegagalan sistem, kesalahan manusia, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

5. Resiko Kepatuhan yaitu Resiko akibat Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan.
6. Resiko Hukum yaitu Resiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis.
7. Resiko Reputasi yaitu Resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persegi negatif terhadap Bank.
8. Resiko Strategi yaitu Resiko ketidak tepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Berdasarkan PBI Nomor: 11/25/PBI/2009, bank diwajibkan menerapkan dan mengungkapkan seluruh resiko yang ada dalam *annual report*-nya. Regulasi lain yang mengatur pengungkapan resiko bagi perusahaan di Indonesia secara umum yaitu PSAK No. 50 (revisi 2009) - Instrumen Keuangan. Penyajian Pengungkapan yang selanjutnya direvisi menjadi PSAK No.60 (revisi 2010)-Instrumen Keuangan: Pengungkapan. PSAK No.50 (revisi 2010), Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan (P3LKEPPBANK) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) pada tahun 2008 dan PSAK N0.60 (revisi 2010) merupakan adopsi dari IFRS *7-Fundamental Instrumen: Disclosure*, dengan beberapa modifikasi yang diperlukan.

Tujuan pengungkapan dalam PSAK No.50 (revisi 2009) yaitu untuk menyediakan informasi guna meningkatkan pemahaman mengenai signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas, serta membantu penilaian jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa depan yang terkait dengan instrumen tersebut. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untung mengevaluasi sifat dan tingkat resiko yang timbul dari instrumen keuangan dimana entitas terpengaruh pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan yang disyaratkan memfokuskan

pada resiko tersebut dikelola. Resiko ini umumnya meliputi resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar dilengkapi dengan resiko mata uang asing, resiko suku bunga, dan resiko harga (PSAK No. 50, revisi 2009).

Perbandingan klasifikasi resiko menurut PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (revisi 2006), P3LKEPPBANK (2008) dan IFRS 7 (2008): PSAK 50 (revisi 2009) klasifikasi *financial risk* tersebut mengaju pada PBI Nomor: 5/8/PBI/2003, PSAK 50 (2009) dan P3LKEPPBANK (2008). Peraturan tersebut dipilih karena sampel yang digunakan dalam penelitian adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009. Menurut Oorschot (2009) sejak terjadinya krisis keuangan tahun 2007, perhatian terhadap pengungkapan resiko pada perbankan mengalami peningkatan. Pemilihan tahun sampel bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan resiko pada perbankan di Indonesia sejak krisi keuangan hingga setelah krisis terjadi.

PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 merupakan landasan utama yang mengatur pelaksanaan pengungkapan resiko bagi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank-bank di Indonesia. Sedangkan P3LKEPPBANK (2008) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM mengatur mengenai ketentuan mengenai pengungkapan resiko-resiko apa saja yang wajib dilakukan oleh bank-bank yang *listing* di BEI. Peraturan tersebut adalah salah satu bentuk perluasan dari PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 karena didalamnya memuat poin-poin yang sama terkait pengungkapannya risiko bank. Selanjutnya, dalam PSAK 50 (2009) Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dijelaskan bahwa perusahaan yang *go public*: termasuk bank diwajibkan mengungkapkan resiko yang dihadapi dalam usahanya pada *annual report*.

Dalam peraturan diatas tidak dijelaskan secara spesifik mengenai item apa saja yang harus diungkapkan. Didukung oleh Devilin (2009) yang menyatakan bahwa BAPEPAM maupun IAI belum menyediakan kerangka kerja konseptual mengenai pengungkapan resiko secara spesifik. Hal tersebut menyediakan penafsiran yang berbeda antara satu bank dengan bank lainnya mengenai item apa saja yang harus

diungkapkan dalam penelitian ini menggunakan item pedoman penerapan manajemen resiko bagi bank umum yang ada pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP/2003.

B. Penerapan Pengungkapan Resiko di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Lembaga Jasa Keuangan Non – Bank, yang selanjutnya disingkat LJKNB, adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, yang meliputi:

- a. Perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usaha dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.
- b. Perusahaan Pialang reasuransi, perusahaan Pialang asuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian.
- c. Dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- d. Perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Agar pengungkapan manajemen resiko dalam laporan tahunan mencakupi kebutuhan informasi para *stakeholder* dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diperlukan adanya perbaikan *corporate governance*. Sejalan dengan pendapat Solomon, Norton dan Joseph (2010) yang menyatakan bahwa pengungkapan resiko mempresentasikan perbaikan praktik *corporate governance*. Resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi LJKNB. Penerapan manajemen resiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank nomor 1/POJK.05/20115 adalah :

1. Resiko Strategi yaitu Resiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama LJKNB.
2. Resiko Operasional yaitu Resiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi atau adanya kejadian yang berasal dari lingkungan LJKNB.
3. Resiko Aset dan Liabilitas adalah resiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas LJKNB.
4. Resiko Kepengurusan yaitu Resiko yang muncul akibat kegagalan LJKNB dalam memelihara komposisi terbaik. pengurusnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
5. Resiko Tata Kelola yaitu Resiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) LJKNB, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan LJKNB.
6. Resiko Dukungan Dana yaitu Resiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada LJKNB, termasuk kurangnya akses tambahan modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana yang tidak terduga.
7. Resiko Asuransi yaitu Resiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidak cukupan proses selesi Resiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
8. Resiko Pembiayaan yaitu Resiko yang muncul akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian bab 1 pasal 1 ata pertanggunggan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,

dengan menerima premi asuransi, memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita asuransi tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan.

Ada beberapa pengertian menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung Mehr dan Cammack (2011).
- b. Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi resiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam pengelola sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.
- c. Sedangkan menurut Danarti (2011) mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :
 1. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
 2. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian asuransi yaitu asuransi adalah alat untuk mengurangi resiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena resiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan akibat pihak lawan memenuhi kewajiban. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan pembiayaan termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.

2.3 Corporate Governance

Dalam menjalankan sebuah perusahaan diperlukan corporate governance yang baik agar perusahaan tetap survive dalam menjalankan aktifitasnya. Terdapat definisi yang berbeda mengenai *corporate governance*. Effendi (2016:2) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengalaman aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut Effendi (2016:2) pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan peraturan, huku, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG), mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak

kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendaikan perusahaan.

Dari beberapa definisi mengenai *corporate governance*, maka dapat disimpulkan *corporate governance* adalah sistem (struktur dan mekanisme) yang baik untuk mengendalikan dan mengelola suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingn dengan perusahaan seperti asosiasi bisnis, pemasok, kreditur, konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas.

Secara umum, *corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlandasan pada prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparancy*) yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan struktur, fungsi, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga dapat terlaksana dengan baik. Dengan terlaksananya prinsip ii, lembaga akan terhindar dari konflik atau benturan kepentingan peran.
3. Responsibilitas (*Responsibility*) yaitu kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan masalah hubungan industrial, pajak, kesehatan/keselamatan, perlindungan lingkungan hidup, standar penggajian yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan dan kewajaran (*Fairness*) yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.3.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja bank serta penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2009). Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI,2011). Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggungjawab atas pengawas kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Menurut Herwidayanto (2010), Indonesia menganut *two tier boards system*, artinya bahwa komposisi dewan pengurus perseroan terdiri dari fungsi eksekutif yaitu dewan direksi dan fungsi pengendalian yaitu dewan komisaris, Berdasarkan kerangka hukum yang ada, fungsi *independent (non-excektive) directors* pada *single-board system* dapat direpresentasikan dengan fungsi dewan komisaris pada *two tier board system*. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ada pada perusahaan di Indonesia terletak pada dewan komisaris.

Jumlah anggota dewan komisaris yang optimum akan lebih efektif daripada jumlah yang kecil (Dalton et al, 2009). Selain itu, menurut Andres, Azofra dan

Lopez (2010) jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan. Kusumawati dan Riyanto (2010) dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel karakteristik dewan yang berupa jumlah komisaris terbukti berhubungan dengan nilai perusahaan. Hasil penelitian Abeysekera (2008) menyatakan bahwa *corporate governane* yang di representasikan dengan dengan ukuran dewan komisaris yang besar diharapkan memunculkan perpaduan skill antar anggotanya sehingga berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disampingkan perusahaan termasuk juga berkaitan dengan *financial risk disclosure*.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Hasil penelitian yang dilakukan Vafeas (2013) menunjukkan bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan dan pengungkapan. sejalan dengan hasil penelitian Vafeas (2013), penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris ini didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisarisnya (Permatasari, 2009). Komisari Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari tabungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG,2009).

Komisaris independen diterapkan sebagai seseorang yang independen dari posisi manajemen eksekutif atau fungsi manajemen lainnya dalam perusahaan dan bebas dari hubungan apapun yang dapat mempengaruhi keputusan (Hegazy 2010). Untuk lebih memantapkan efektifitas komisaris independen, keberadaan komisaris independen telah diatur dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 pasal 5 yang

menetapkan bahwa komposisi komisaris independen sekurang-kurangnya berjumlah 50% dari jumlah anggota dewan komisaris.

Memasukan *independen directors* kedalam susunan dewan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah manajer membuat keputusan yang tidak efisien (Ho dan Wong, 2011). Siallagan dan Machfoedz (2009) menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Li, Pike, dan Haniffa (2008) yang menemukan hubungan signifikan antara *independen directors* dengan *intellectual capital disclosure*. Menurut Nurkhim (2009), Komposisi komisaris independen terbukti berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.2 Komite Audit

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik adalah perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari diluar bursa efek Indonesia juga terkena kewajiban untuk komite audit yang salah satu tugasnya berkaitan dengan audit eksternal berhubungan dengan audit internal dan pengendalian internal.

Ketentuan dan peraturan mengenai Komite Audit diantaranya :

1. Surat Edaran No.SE-03/PM/2000, mengatur mengenai komite audit dalam jumlah dan kualifikasi keanggotaan.
2. Keputusan Direksi BEJ No. Kep-339/BEJ/07-2001, mengatur mengenai komite audit, jumlah dan kualifikasi keanggotaan.
3. Surat Keputusan ketua Bapepam No. Kep-412/PM/2003, tentang pedoman pembentukan komite audit.

4. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan BUMN mempunyai Komite Audit.
5. Peraturan No.IX.15 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, lampiran keputusan ketua Bapepam No.29/PM/2004.

Menurut Hiro Tugiman (1995), pengertian komite adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk menjalankan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu menjelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris. Selain itu, fungsi komite audit sendiri yaitu membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan.

Sedangkan menurut Peraturan No. IX.15 dalam lampiran keputusan ketua BAPEPAM No: Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa komite adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Selain itu, komite audit juga bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

2.4 Rasio Profitabilitas

2.4.1 Pengertian Rasio Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan. Menurut Agus Sartono (2011) definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Menurut Kasmir (2017:115) definisi rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini

juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba definisi rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Pengertian rasio profitabilitas menurut Fahmi (2013:11) adalah rasio profitabilitas yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial aka menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dengan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka akan semakin baik menggambarkan kemampuan perolehan keuntungan perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat menimbulkan keterarikan *prinsipal* untuk membeli saham atau berinvestasi disuatu perusahaan. Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan resiko yang dilakukan karena menunjukan kepada *stakeholder* mengenai kemampuan perusahaan dalam mengefesienkan penggunaan modal di dalam perusahaannya.

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi serta diikuti dengan resiko yang tinggi pula, akan terdorong untuk mengungkapkan informasi resiko yang semakin luas. Terdapat hubungan positif antara profitabilitas perusahaan dengan luas pengungkapan resiko, karena manajer perusahaan dalam upaya meningkatkan keuntungan (profitabilitas) akan memberikan informasi yang lebih luas dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan para investor yang pada gilirannya akan meningkatkan kompensasi yang akan mereka terima (Singhvi dan Desai, 1971 dalam (Alijifri & Hussainey, 2007).

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, aktiva maupun investasi.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak internal, tetapi juga bagi pihak eksternal atau diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2016:197), adalah:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas menurut Kasmir (2017:198), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.4.3 Pengukuran Rasio Profitabilitas

Secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, diantaranya :

1. Profit Margin (Profit Margin on Sale)
2. Return on Assets (ROA)
3. Return on Equity (ROE)
4. Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share)

➤ Return on Equity (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

(Kasmir 2017:204)

Return on Equity (ROE) digunakan sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas. yang dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dengan rata – rata total ekuitas. Alasan peneliti memilih ROE, karena ROE adalah rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, rasio ini dianggap paling tetap di antara rasio profitabilitas lainnya. Menurut Haraphap (2007:157) ROE merupakan perbandingan antara laba bersih suatu emiten dengan modal sendiri yang dimiliki. ROE yang tinggi menyatakan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modalnya sendiri. Peningkatan ROE akan ikut meningkatkan nilai jual perusahaan.

2.5 Penelitian Terdahulu

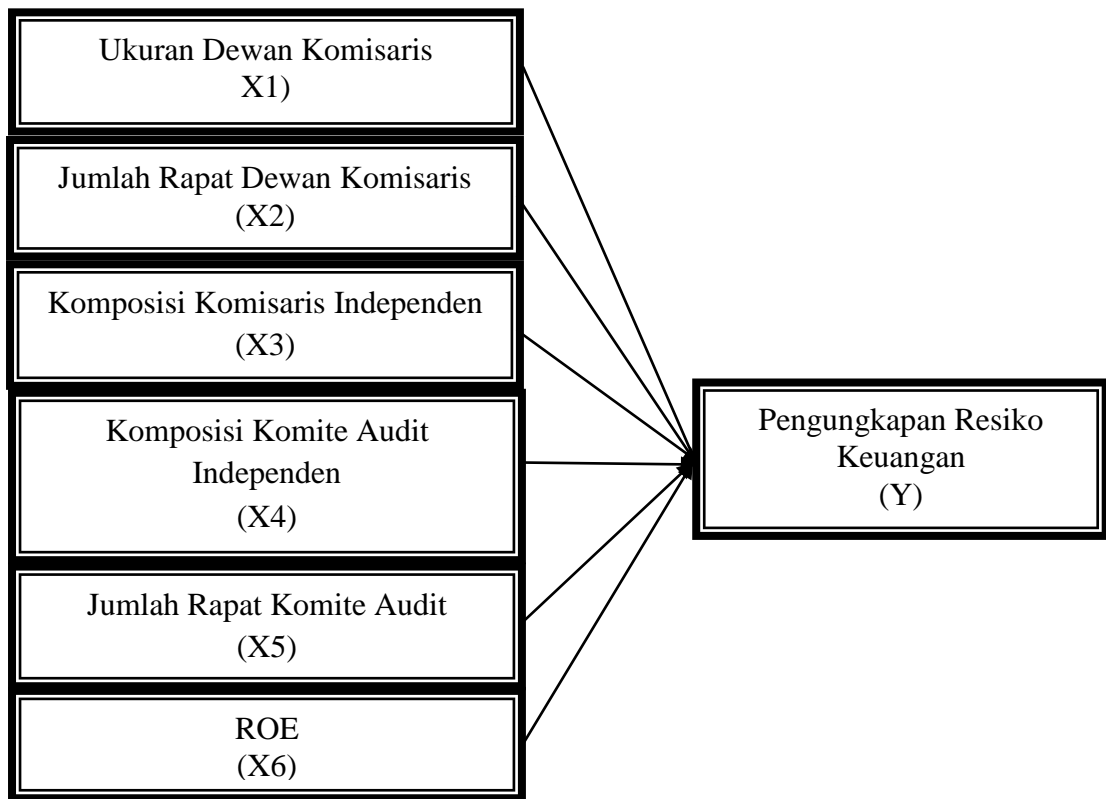
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Dewi. (2011), Pengungkapan Resiko Finansial dan Tata Kelola Perusahaan	Analisis Regresi berganda	Variabel independen (<i>corporate governance</i>) yang mempengaruhi tingkat pengungkapan resiko keuangan yaitu ukuran dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan. Sedangkan komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko finansial.
2	Suhardjanto. Djoko., dkk. (2012), Peran <i>Corporate Governance</i> Dalam Praktik <i>Risk Disclosure</i> pada Perbankan Indonesia	Analisis Regresi berganda	Variabel yang mempengaruhi tingkat <i>risk disclosure</i> berupa ukuran dewan komisaris (<i>board size</i>), jumlah rapat dewan komisaris <i>leverage</i> , variabel lainnya yaitu proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, latar belakang etnis komisaris utama, komposisi komisaris

			independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>risk disclosure</i> .
3	Utomo. Yogi. (2014), Determinan Pengungkapan risiko	Analisis regresi berganda	Pengungkapan risiko keuangan perusahaan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, komisaris independen, komite audit, leverage, jenis industri, frekuensi rapat dewan komisaris
4	Endah. Sayekti., & Wiyadi. (2017), Determinan Financial Risk Disclosure	Analisis statistik deskriptif dan Analisis regresi berganda	Pengungkapan risiko keuangan perusahaan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, tipe industri dan profitabilitas, sedangkan konsentrasi kepemilikan dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan risiko keuangan.
5	Astawan. (2017), Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Risk Disclosure</i> pada Perbankan Indonesia	Analisis Regresi berganda	Variabel corporate governance yang di presentasikan ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan resiko keuangan. Sedangkan variabel corporate governance yang di presentasikan jumlah rapat dewan

			komisaris, komposisi audit independen, dan jumlah rapat komite audit, tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan
--	--	--	---

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terdiri dari dua arah yaitu untuk menjelaskn variabel *corporate governance* yang di presentasikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, dan profitabilitas mempengaruhi pengungkapan resiko keuangan.

2.7 Bangunan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI,2010). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) jumlah dewan komisaris yang dinilai efektif berada pada rentang lebih dari 5 (lima) orang dan kurang dari 14 orang. Selain itu, jumlah dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan (Andres et al, 2010). Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Aktifnya peran dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya sangat tergantung pada lingkungan yang diciptakan oleh perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2010) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang di proksikan dengan jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang kecil (Dalton et al, 2009); Nasution dan Setiawan, 200; dan Abeysekera, 2008). Oleh karena itu, jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi, termasuk pengungkapan resiko keuangan.

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan

2.7.2 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Dewan komisaris harus memiliki jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat rapat tersebut dilakukan untuk mengetahui

apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun. Semakin banyak rapat yang dilakukan dewan komisaris akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Vafeas (2013) dan Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan bahwa semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan penelitian Vafeas (2010) dan Brick dan Chidambaran (2007), Ettredge et al (2010) menyatakan bahwa semakin banyak rapat dewan komisaris maka semakin mendorong kepatuhan pengungkapan wajib.

H2 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan

2.7.3 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelola internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan (Siallagan dan Machfoedz, 2009). Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris (Permatasari, 2009). Selain itu, komisaris independen dapat meningkatkan reputasi berkaitan dengan pengendalian yang efektif sehingga berpengaruh secara terhadap pengungkapan informasi perusahaan (Abeysekera, 2008; Permatasari, 2009; dan Ettredge et al, 2010). Cerbion dan Parbonetti (2007) menemukan asosiasi yang positif signifikan antara proporsi independent directors terhadap intellectual capital disclosure. Hasil penelitian Nurkhin (2009) menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Oleh karena itu, semakin independen dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan financial risk disclosure.

H3 : Komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan

2.7.4 Pengaruh Komposisi Komite Audit Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Menurut Herwidayatmo (2010) peran pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris perusahaan di Indonesia belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan komite audit untuk membantu dewan komisaris. Menurut FGCI (2011), komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP. 29/PM/2004, komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Dari aspek pengendalian, keberadaan komite audit yang efektif sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan (Herwidayatmo).

Komite audit dapat menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen. Nasution dan Setiawan (2007), Li et al (2008), dan Cety dan Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan termasuk dalam pengungkapan informasi. Semakin independen komite audit, diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan resiko keuangan.

H4 : Komposisi komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan

2.7.5 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Komite audit memiliki fungsi pengawasan terhadap operasi perusahaan termasuk kaitannya dengan praktik dengan praktik kinerja perusahaan (Cety dan Suhardjanto, 2010). Komite audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya audit charter dan agenda program kerja tahunan tertulis dari komite audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat komite audit (Alijayo, 2013). Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat komite audit yang

dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Menurut Permatasari (2009), rapat komite audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Li et al (2008) menemukan bukti bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap disclosure. Ettredge et al (2010) juga menemukan bukti bahwa semakin banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit maka semakin banyak rapat yang dilakukan oleh komite audit maka semakin mendorong kepatuhan pengungkapan wajib. Semakin sering dilakukan rapat komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan resiko keuangan.

H5 : Komposisi komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan

2.7.6 Pengaruh ROE Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Profitabilitas merupakan karakteristik yang menunjukkan keberhasilan atas kemampuan perusahaan dalam menghasikan profit. Sesuai dengan perspektif teori keagenan, manajer di perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menyediakan informasi yang lebih banyak mengenai risiko dalam laporan keuangan interim (Elzahar & Hussainey, 2012). Hal tersebut dimungkinkan karena untuk menyeimbangkan kinerja manajer saat ini terhadap pemegang saham. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya. Hal tersebut dilakukan karena tingginya profitabilitas mengindikasikan bahwa perusahaan yang bersangkutan dapat mengelola resiko dengan baik. Hal ini memberikan informasi dan sekaligus sebagai bentuk sinyal baik bagi para pemegang saham mengenai bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko-risiko yang dihadapi dalam laporan tahunan perusahaan.

H₆ : ROE berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal penelitian itu di peroleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dokumenter situs www.idx.co.id serta makalah, jurnal, buku, penelitian, buku, situs internet yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan dari situs masing-masing perusahaan sampel Wiratna (2014).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Peneliti akan mengumpulkan data melalui:

1. Pengumpulan data sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data – data yang diperoleh melalui situs internet www.idx.co.id yaitu berupa laporan keuangan entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menelaah data skunder yang berkaitan.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal maupun makalah yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleh dasar-dasar teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisa masalah yang diteliti sebagai pedoman untuk melakukan studi dalam melakukan penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2017 tentang pengungkapan risiko pada perusahaan keuangan mengalami peningkatan sehingga penelitian ini menjadi

relevan untuk dilakukan sebagai sarana evaluasi atas pengungkapan risiko yang telah dilakukan oleh perusahaan keuangan.

3.3.2 Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Hartono, 2010).

Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1 Perusahaan Keuangan yang terdaftar di BEI 2015-2017
- 2 Menerbitkan *annual report* selama tiga tahun berturut – turut untuk tahun 2015-2017 yang di publikasikan.
- 3 Perusahaan keuangan yang mempublikasikan pengungkapan resiko keuangan selama tiga tahun berturut-turut untuk tahun 2015-2017.
- 4 Perusahaan keuangan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah
- 5 Mempunyai data yang lengkap untuk penelitian.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan suatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda atau berubah Sakaran (2009). Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan dependen. Ditambah dengan variabel kontrol. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

3.4.1 Variabel Dependen

Berdasarkan penelitian Oorschot (2009) pengukuran risk disclosure dalam annual report menggunakan teknik scoring untuk mengukur risk disclosure. Skor 1 diberikan untuk item-item financial risk yang diungkapkan perusahaan dan skor 0 bagi item-item yang tidak diungkapkan perusahaan. Resiko yang harus mencakup dalam pengungkapan laporan keuangan menurut PBI Nomor: 11/25/PBI/2009 dan

Penerapan manajemen resiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank nomor 1/POJK.05/20115. Dengan rumus:

$$\text{Indeks Risk Disclosure} = \frac{\sum \text{Butir Informasi Yang di Ungkap}}{\sum \text{Semua Butir Informasi}}$$

Tabel 3.1
Pengungkapan Resiko

No	Bank	Non Bank
1	Resiko Kredit	Resiko Strategi
2	Resiko Pasar	Resiko Operasional
3	Resiko Likuiditas	Resiko Aset dan Liabilitas
4	Resiko Operasional	Resiko Kepengurusan
5	Resiko Kepatuhan	Resiko Tata Kelola
6	Resiko Hukum	Resiko Dukungan Dana
7	Resiko Reputasi	Resiko Asuransi
8	Resiko Strategi	Resiko Pembiayaan

3.4.2 Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2014). Sedangkan Variabel Independen dalam penelitian ini dipresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi audit independen dan jumlah rapat komite audit.

3.4.1.1 Corporate Governance

a. Ukuran Dewan komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktifitas pengendalian dan pengawasan (Andres et al, 2010). Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Dalton (2009), Nasution dan Setiawan (2007) dan Abeysekera (2008) yaitu jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari internet maupun eksternal perusahaan.

$$\text{Dewan Komisaris} = \text{Komisaris Internal} + \text{Komisaris Eksternal}$$

b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris adalah rapat yang dilakukan dewan komisaris dalam suatu perusahaan selama 1 tahun. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Brick dan Chidambaran (2007) dan Ettredge et al (2010) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu 1 tahun.

$$\text{Rapat Komisaris} = \text{Total Rapat Dekom Selam 1 Tahun}$$

c. Komposisi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen diukur dengan persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Abeysekera (2008), Permatasari (2009) dan Ettredge et al (2010).

$$\text{Komposisi Komisari Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

d. Komposisi Komite Audit Independen

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit independen merupakan anggota komite audit yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Indikator yang digunakan sesuai dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007), Li et al (2008), dan Cety dan Suhardjanto (2010).

$$\text{Komposisi Komite Audit} = \frac{\text{Komite Audit Independen}}{\text{Jumlah Komite Audit}}$$

e. Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite audit merupakan rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam perusahaan dalam satu tahun. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun (FCGI,2001). Menurut Permatasari (2009), rapat komite audit dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan indikator yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian Li et al (2008), Permatasari (2009) dan Ettredge et al (2010), yaitu jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun.

$$\text{Rapat Komite Audit} = \text{Total Rapat Audit Selama 1 Tahun}$$

g. ROE

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Atasovski et al., 2015), *return on Equity* (ROE) digunakan sebagai proksi untuk mengukur profitabilitas, yang dihitung dengan membandingkan antara laba bersih dengan rata – rata total ekuitas. Menurut Haraphap (2007:157) ROE merupakan perbandingan antara laba bersih suatu emiten dengan modal sendiri yang dimiliki. ROE yang tinggi menyatakan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modalnya sendiri. Peningkatan ROE akan ikut meningkatkan nilai jual perusahaan.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *Regresi Linier Berganda*. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, metode ini mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali. 2011). Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiono, 2017). Pengukuran yang digunakan statistik deskriptif ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari suatu data.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam model regresi untuk memberikan hasil *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)* atau menghindari terjadinya estimasi yang bias. Regresi dikatakan *BLUE* apabila memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian yang dilakukan adalah uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolonieritas.(Ghozali, 2016).

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016). Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Apabila data hasil perhitungan one-sampel *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai dibawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah:

- a. Jika *tolerance value* $>0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolonieritas.
- b. Jika *tolerance value* $<0,10$ dan $VIF > 10$, maka terjadi multikolonieritas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam model regresi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung autokorelasi (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, untuk menguji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin – Watson (*DW test*) dengan hipotesis:

H_0 = tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_1 = ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Nilai Durbin-Watson harus dihitung terlebih dahulu, kemudian bandingkan dengan nilai batas atas (d_U) dan nilai batas bawah (d_L) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) $dw < d_L$, ada autokorelasi positif
- 2) $dw > d_U$, tidak terjadi autokorelasi
- 3) $d_L < dw < d_U$, tidak dapat disimpulkan
- 4) $dw > 4 - d_L$, ada autokorelasi negative
- 5) $d < 4 - d_U$, tidak terjadi autokorelasi
- 6) $4 - d_U < dw < -d_L$, tidak dapat disimpulkan
- 7) $dw < d_L$, ada autokorelasi positif dan negative
- 8) $dw > 4 - d_L$, ada autokorelasi positive dan negative
- 9) $d_U < dw < 4 - d_U$, tidak terjadi autokorelasi
- 10) $4 - d_U < dw < 4 - d_L$, tidak dapat disimpulkan

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dalam model regresi bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variasi* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variasi* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap disebut homokedastisitas dan jika sebaliknya disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Gletser* (Ghozali, 2016).

Metode yang sering digunakan yaitu metode Gletser

Syaratnya yaitu pada kolom coefecient:

- a) Apabila $\text{sig.} > 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka tidak terjadi hetroskedastisitas
- b) Apabila $\text{sig.} < 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka terjadi hetroskedastisitas

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel independen. Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. (Priyanto, 2012) untuk menguji hubungan antara struktur *corporate governance*, *profitabilitas* terhadap *finanacial risk disclosure*, digunakan model regresi linear berganda. Model penelitian regresi linier berganda yaitu sebagai berikut: ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan profitabilitas.

$$Y(\text{PRK}) = \beta_1\text{UDK} + \beta_2\text{RPTDK} + \beta_3\text{KKI} + \beta_4\text{KKAI} + \beta_5\text{RPTKA} + \beta_6\text{ROE} + \epsilon$$

Keterangan:

PRK : Pengungkapan Resiko Keuangan

UDK : Ukuran Dewan Komisaris

RPTDK : Jumlah Rapat Dewan Komisaris

KKI	: Komposisi Komisaris Independen
KKAI	: Komposisi Komite Audit Independen
RPTKA	: Jumlah Rapat Komite Audit
ROE	: <i>Return on Equity</i>

3.6.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali: 2016). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

3.6.3 Uji F

Uji F kelayakan model (Uji F) digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut :

1. Jika F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan (Sig < 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model penelitian tersebut sudah layak.
2. Jika F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan (Sig > 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model penelitian tersebut tidak layak.

3.6.4 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian secara parsial (uji t) ini dilakukan dengan membandingkan antara tingkat signifikan t dari hasil pengujian dengan nilai signifikan yang digunakan dalam penelitian ini hipotesis di uji

dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5% atau 0,05. apabila nilai signifikan $t < 0,05$ maka secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila nilai signifikan $t > 0,05$ maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. (Ghozali.2016).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi Pengungkapan Resiko Keuangan pada perusahaan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar pada BEI pada periode 2015-2017. Perusahaan Keuangan dipilih untuk penelitian ini karena terdapat banyak resiko dalam perusahaan keuangan. Adapun pemilihan sampel ini menggunakan metode *purposive sampling* yang telah ditetapkan dengan beberapa kriteria. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah program *SPSS 20*.

**Tabel 4.1
Kriteria Sampel**

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan Keuangan yang di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017	89
2	Perusahaan Keuangan tidak menerbitkan <i>annual report</i> selama tiga tahun berturut-turut untuk tahun 2015-2017 yang di publikasikan	8
3	Perusahaan keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	0
4	Perusahaan keuangan yang tidak mempublikasikan pengungkapan resiko keuangan selama tiga tahun berturut-turut untuk tahun 2015-2017	10
5	Tidak mempunyai data lengkap untuk penelitian	5
6	Jumlah Perusahaan Keuangan yang dijadikan sampel penelitian	66
7	Jumlah Observasi (66 sampel x 3 tahun penelitian)	198

Sumber : Data yang di olah, 2019

Jumlah perusahaan keuangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 berjumlah 90 bank, dari 90 perusahaan tersebut ada 22 perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode penelitian 2015-2017 dan 2 perusahaan tidak mengungkapkan resiko keuangan. Sehingga jumlah 90 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 66 perusahaan. Sedangkan periode penelitian 3 tahun maka total sampel dalam penelitian ini sebanyak 198 sampel.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Gambaran variabel-variabel dapat dilihat dari rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRK	198	,50	1,00	,8553	,17137
UDK	198	2	10	4,33	1,753
RPTDK	198	4	87	17,98	13,241
KKI	198	,25	,80	,5138	,12640
KKAI	198	,25	,71	,3737	,09703
RPTKA	198	2	32	9,15	6,142
ROE	198	-,983	,269	,06286	,140602
Valid N (listwise)	198				

Sumber : Data yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan informasi tentang gambaran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengungkapan Resiko Keuangan (PRK)

Pengungkapan resiko keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 0,50 atau hanya sebanyak 4 item pengungkapan resiko keuangan dan nilai maksimum sebesar 1,00 yang mengungkapkan semua item pengungkapan resiko keuangan

yang berjumlah 8 item, dengan nilai rata-rata pengungkapan resiko keuangan sebesar 0,8553 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,17137. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel pengungkapan resiko keuangan. Perusahaan yang memiliki pengungkapan resiko terendah yaitu 0,50% adalah INPC, DEFI, IMJS, PADI, PANS, TRIM, BPF, GSMF. Sedangkan perusahaan yang memiliki pengungkapan resiko tertinggi yaitu 1,00% adalah ARGO, AGRS, BBKA, BBKP, BBNI, BBNP, BBRI, BBTN, BDMN, BJBR, BJTM, BMRI, BNBA, BNGA, BNLI, BSIM, BSWD, BTPN, BVIC, PNPC, MAYA, MEGA, NAGA, PNB, BBYB, MCOR, BCIC, BBHI.

2. Ukuran Dewan Komisaris (UDK)

Nilai minimum dari ukuran dewan komisaris adalah 2 orang sedangkan nilai maksimum didapat 10 orang. Mean (rata-rata) yang dimiliki observasi dalam ukuran dewan komisaris yaitu dinilai 4,33 dan standar deviasinya 1,753. Standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel ukuran dewan komisaris. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris terendah yaitu 2 orang adalah Bank Dinar Indonesia Tbk, PT. Arthavest Tbk pada tahun 2017, Buana Finance Tbk pada tahun 2016, Danasupra Eracific Tbk, Mandala Multifinance Tbk, Magna Finance Tbk, PT. Pacific Strategic Financial Tbk, Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, Paninvest Tbk pada tahun 2015, 2016, 2017, sedangkan perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris tertinggi yaitu 10 orang adalah Bank Cimb Niaga Tbk pada tahun 2016.

3. Jumlah Rapat Dewan Komisaris (RPTDK)

Nilai minimum dari jumlah rapat dewan komisaris sebesar 4 kali pertemuan dan nilai maksimum sebesar 87 kali pertemuan. Nilai rata-rata jumlah dewan komisaris sebesar 17,98 dan standar deviasi 13,241. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel jumlah rapat dewan komisaris. Perusahaan yang memiliki jumlah rapat terendah yaitu 4 kali rapat adalah PT. Trust Finance Indonesia Tbk tahun 2015, 2016, 2017. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi yaitu 87 kali rapat adalah Bank Tabungan Negara Tbk pada tahun 2017.

4. Komposisi Komisaris Independen (KKI)

Nilai minimum dari komposisi komisaris independen 0,25 dan nilai maksimum 0,80. Nilai rata-rata komposisi komisaris independen sebesar 0,5138 dan standar deviasi 0,12640. Standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan tingginya simpangan data variabel komposisi komisaris independen. Perusahaan yang memiliki komposisi komisaris independen terendah yaitu 0,25 adalah Sinar Mas Multiartha Tbk pada tahun 2015, Equity Development Investment Tbk pada tahun 2016, 2017. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi yaitu 0,80 adalah Bpd Jawa Barat & Banten Tbk pada tahun 2017, Bpd Jawa Timur Tbk pada tahun 2016, 2017.

5. Komposisi Komite Audit Independen (KKAI)

Nilai minimum dari komposisi komite audit independen 0,25 dan nilai maksimum 0,71. Nilai rata-rata komposisi komite audit independen 0,3737 dan standar deviasi 0,09703. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel komposisi komite audit independen. Perusahaan yang memiliki komposisi komite audit terendah yaitu 0,25 adalah Bank Victoria International Tbk, Bpd Jawa Barat & Banten Tbk pada tahun 2016, Bank Dinar Indonesia Tbk pada tahun 2015, 2016, 2017. Sedangkan perusahaan yang memiliki komposisi komite audit independen tertinggi yaitu 0,71 adalah Bank Tabungan Negara Tbk pada tahun 2016.

6. Jumlah Rapat Komite Audit (RPTKA)

Nilai jumlah rapat komite audit 2 kali pertemuan dan nilai maksimum sebesar 32 kali pertemuan dan nilai rata-rata jumlah rapat komite audit sebesar 9,15 dan nilai standar deviasi sebesar 6,142. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan rendahnya simpangan data variabel jumlah rapat komite audit. Perusahaan yang memiliki jumlah rapat terendah yaitu 2 kali rapat adalah Asuransi Multi Artha Guna Tbk pada tahun 2015, 2016, sedangkan perusahaan yang memiliki jumlah rapat komite audit tertinggi yaitu 32 kali rapat adalah Bank BRI Argoniaga Tbk pada tahun 2016.

7. Profitabilitas (ROE)

Sedangkan ROE mempunyai nilai maksimum -0,983% dan nilai maksimum 0,269% dan nilai rata-rata ROE sebesar 0,06286 dan nilai standar deviasi sebesar 0,140602. Standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-rata menunjukkan tingginya simpangan data variabel ROE. Perusahaan yang memiliki profitabilitas terendah yaitu -0,983% adalah Magna Finance Indonesia Tbk pada tahun 2016. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai tertinggi yaitu 0,269% adalah Asuransi Jasa Tania pada tahun 2015.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji *Komogorov-Smirnov Z*. Apabila data hasil perhitungan one-sampel *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai dibawah 0,05, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016).

Tabel 4.3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		198
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,13825485
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,075
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		1,191
Asymp. Sig. (2-tailed)		,117

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data yang diolah, 2019

Hasil uji normalitas dengan menggunakan *kolomogrov-smirnov* yang dipaparkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dependen K-Z sebesar 1,191 dengan tingkat signifikan sebesar 0,125. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa angka signifikan (Sig) untuk variabel dependen pada uji *kolomogrov-smirnov* diperoleh 0,117 > 0,05 artinya data terdistribusi secara normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2016).

Tabel 4.4
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,443	,055		8,069	,000		
UDK	,028	,007	,283	3,961	,000	,669	1,495
RPTDK	,001	,001	,115	1,493	,137	,574	1,741
1 KKI	,408	,085	,301	4,796	,000	,865	1,156
KKAI	,083	,120	,047	,695	,488	,742	1,348
RPTKA	,004	,002	,135	1,755	,081	,572	1,748
ROE	-,157	,073	-,129	-2,155	,032	,952	1,051

a. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas diketahui bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris memiliki nilai tolerance sebesar 0,669 dan nilai VIF sebesar 1,495 sedangkan variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris memiliki nilai tolerance sebesar 0,574 dan nilai VIF sebesar 1,741, untuk variabel Komposisi Komisaris Independen memiliki nilai tolerance sebesar 0,865 dan nilai VIF sebesar 1,156. Sedangkan variabel Komposisi Komite Audit Independen memiliki nilai tolerance

sebesar 0,742 dan nilai VIF sebesar 1,348. Untuk variabel Jumlah Rapat Komite Audit memiliki nilai tolerance sebesar 0,572 dan nilai VIF sebesar 1,748. Dan variabel Profitabilitas (ROE) memiliki nilai tolerance sebesar 0,952 dan nilai VIF sebesar 1,051. Dari hasil di atas diperoleh kesimpulan bahwa seluruh nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10,. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel independennya.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (Sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Menurut Ghozali (2011) ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya adalah Uji Durbin Watson.

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,591 ^a	,349	,329	,14041	,785

a. Predictors: (Constant), ROE, KKI, UDK, RPTDK, KKAI, RPTKA

b. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data yang diolah, 2019

Nilai DW sebesar 0,785 nilai ini jika dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% dengan jumlah sampel sebanyak 198 serta jumlah variabel independent (K) sebanyak 6, maka Durbin-Watson akan didapat nilai dl sebesar 1,716 dan du sebesar 1,819. Dapat di ambil kesimpulan bahwa : $dw < 4-du$, yaitu artinya dw (0,785) lebih kecil dari $4-du$ (2,181). Maka dapat di ambil keputusan tidak ada autokorelasi positif pada model regresi tersebut.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dalam model regresi bertujuan menguji apakah terjadi ketidak samaan *varians* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *varians* dari *residual* satu pengamatan yang lain tetap disebut homokedastisitas dan jika sebaliknya disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Gletser* (Ghozali, 2016)

Tabel 4.6
Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,234	,030		7,890	,000
UDK	-,006	,004	-,125	-1,515	,131
RPTDK	,000	,001	-,045	-,498	,619
1 KKI	-,054	,046	-,086	-1,182	,239
KKAI	-,145	,065	-,177	-2,246	,026
RPTKA	-,001	,001	-,081	-,902	,368
ROE	7,676E-005	,039	,000	,002	,998

a. Dependent Variable: ARES

Sumber : Data yang diolah, 2019

Berdasarkan dari tabel diatas terlihat bahwa variabel Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Komposisi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Profitabilitas memiliki nilai signifikan $>0,05$ (0,131; 0,619; 0,239; 0,268; 0,998 $> 0,05$) Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 5 variabel terhindar dari heteroskedastisitas, sedangkan pada variabel Komposisi Komite Audit Independen (0,026 $< 0,050$) terkena gejala heteroskedastisitas. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi terhindar dari heteroskedastisitas karena lebih banyak yang memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (Putra,2018:45).

4.3 Hasil Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda dengan $\alpha=5\%$. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut

Tabel 4.7
Hasil Analisis Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,443	,055		8,069	,000
UDK	,028	,007	,283	3,961	,000
RPTDK	,001	,001	,115	1,493	,137
1 KKI	,408	,085	,301	4,796	,000
KKAI	,083	,120	,047	,695	,488
RPTKA	,004	,002	,135	1,755	,081
ROE	-,157	,073	-,129	-2,155	,032

a. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data yang di olah, 2019

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah:

$$Y (\text{PRK}) = 0,443 + 0,028\text{UDK} + 0,001\text{RPTDK} + 0,408\text{KKI} + 0,083\text{KKAI} + 0,004\text{RPTKA} - 0,157\text{ROE} + \epsilon$$

Dari hasil persamaan tersebut dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konstan bernilai positif sebesar 0,443. Hal tersebut memiliki arti bahwa jika variabel independen dianggap bernilai konstan, maka nilai pengungkapan resiko keuangan (PRK) sebesar 0,443.
2. Koefisien ukuran dewan komisaris bernilai positif sebesar 0,028. Nilai koefisien tersebut memiliki arti apabila ukuran dewan komisaris mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan, maka nilai pengungkapan resiko (PRK) akan mengalami peningkatan 0,028.

3. Koefisien jumlah rapat dewan komisaris bernilai negatif sebesar 0,408. Nilai koefisien tersebut memiliki arti apabila jumlah rapat dewan komisaris mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan, maka pengungkapan resiko (PRK) akan mengalami peningkatan 0,408.
4. Koefisien komposisi komisaris independen bernilai positif sebesar 0,001. Nilai koefisien tersebut memiliki arti apabila komposisi komisaris independen mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan, maka nilai pengungkapan resiko (PRK) akan mengalami peningkatan 0,001.
5. Koefisien komposisi komite audit independen bernilai positif sebesar 0,083. Nilai koefisien tersebut memiliki arti apabila komposisi komite audit independen mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan, maka nilai pengungkapan resiko (PRK) akan mengalami peningkatan 0,083.
6. Koefisien jumlah rapat audit bernilai positif sebesar 0,004. Nilai koefisien tersebut memiliki arti apabila jumlah rapat komite audit mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan, maka nilai pengungkapan resiko (PRK) akan mengalami peningkatan 0,004.
7. Koefisien ROE bernilai negatif sebesar -0,157. Nilai koefisien tersebut memiliki arti apabila profitabilitas mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lainnya bernilai konstan, maka pengungkapan resiko (PRK) akan mengalami penurunan -0,157.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali: 2016). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,591 ^a	,349	,329	,14041

a. Predictors: (Constant), ROE, KKI, UDK, RPTDK, KKAI, RPTKA

b. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Pada tabel di atas menunjukkan keefisien determinasi dengan nilai *R Square* untuk variabel ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, profitabilitas diperoleh sebesar 0,349 hal ini berarti bahwa 34,9% dari pengungkapan resiko keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut sedangkan sisanya sebesar 65,1% dijelaskan oleh variabel lain.

4.3.3 Uji F

Uji F kelayakan model (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah regresi layak atau tidak untuk digunakan statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan ($\text{sig} < 0,05$) maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan ($\text{sig} > 0,05$) maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.

Tabel 4.9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,020	6	,337	17,078	,000 ^b
	Residual	3,766	191	,020		
	Total	5,786	197			

a. Dependent Variable: PRK

b. Predictors: (Constant), ROE, KKI, UDK, RPTDK, KKAI, RPTKA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Dari tabel Anova diperoleh F_{hitung} 17,078 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai F_{tabel} yaitu 2,14. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ (17,078 > 2,14) atau $sig < 0,05$ (0,000 < 0,05), maka model regresi layak.

4.3.4 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen. apabila nilai signifikansi $t < 0,05$ maka secara parsial variable independen berpengaruh terhadap variable dependen. Sedangkan apabila nilai signifikansi $t > 0,05$ maka secara parsial variable independen tidak berpengaruh terhadap variable dependen. (Ghozali. 2016)

Tabel 4.10
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,443	,055		8,069	,000
UDK	,028	,007	,283	3,961	,000
RPTDK	,001	,001	,115	1,493	,137
1 KKI	,408	,085	,301	4,796	,000
KKAI	,083	,120	,047	,695	,488
RPTKA	,004	,002	,135	1,755	,081
ROE	-,157	,073	-,129	-2,155	,032

a. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data yang diolah, 2019

1. Hasil untuk variabel Ukuran Dewan Komisaris (X1) menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,961 > 1,972) dengan signifikan $< 0,05$ (0,000 < 0,050) maka H1 diterima yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan.
2. Hasil untuk variabel Jumlah Rapat Dewan Komisaris (X2) menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1,493 < 1,972) dengan signifikan $> 0,05$ (0,137 > 0,050) maka H2 ditolak yang menyatakan bahwa Jumlah Rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan.

3. Hasil untuk variabel Komposisi Komisaris Independen (X3) menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,796 > 1,972$) dengan signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,050$) maka H3 diterima yang menyatakan bahwa Komposisi Komisaris Independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan.
4. Hasil untuk variabel Komposisi Komite Audit Independen (X4) menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,695 < 1,972$) dengan signifikan $> 0,05$ ($0,448 > 0,050$) maka H4 ditolak yang menyatakan bahwa ukuran dewan komi Komposisi Komite Audit Independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan.
5. Hasil untuk variabel Jumlah Rapat Komite Audit Independen (X5) menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,755 < 1,972$) dengan signifikan $> 0,05$ ($0,081 > 0,050$) maka H5 ditolak yang menyatakan bahwa Jumlah Rapat Komite Audit Independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan.
6. Hasil untuk variabel ROE (X6) menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-2,155 > 1,972$) dengan signifikan $< 0,05$ ($0,032 < 0,050$) maka H6 diterima yang menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian secara persial (Uji t) membuktikan variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan. Dewan komisaris merupakan peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* berada yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komisaris, maka tingkatan pengawasan dan tekanan terhadap manajemen semakin baik sehingga mendorong manajemen lebih transparan dalam mengungkapkan resiko.

Dewan komisaris ditugaskan dan diberikan tanggungjawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Pada intinya, dewan komisaris adalah suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan, Nasution dan Setiawan (2007). Koefisien positif yang dimiliki dewan komisaris menunjukkan hubungan positif ukuran dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan resiko keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) dan Suhardjanto (2012) yang menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Serta mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2011), Astawan (2017).

4.4.2 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian secara persial (Uji t) membuktikan variabel rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan. Rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang yang intensif untuk

mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi bank sesuai pasal 9, PBI Nomor: 8/14/PBI/2006. Rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala dan berbobot mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, termasuk meningkatkan pengungkapan resiko. Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris. Dengan jumlah rapat yang lebih sedikit mendorong dewan komisaris untuk membentuk suatu komite yang membantu melakukan pengawasan, khususnya pengawasan dan pengendalian resiko, dalam menciptakan efektivitas kinerja Dewan Komisaris itu sendiri, Ettredge, et al (2010).

Intensitas rapat yang kurang menyebabkan Dewan Komisaris kurang begitu memperoleh informasi yang lengkap mengenai potensi resiko yang dihadapi oleh perusahaan kemudian hari. Oleh karena itu, mendorong terjadinya pembentukan suatu komite mandiri yang membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi secara lengkap mengenai potensi resiko yang akan dihadapi perusahaan. Alasan yang tepat untuk menjelaskan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan karena rapat-rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris kurang efektif, dikarenakan adanya dominasi suara dari anggota dewan komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010), Astawan (2017).

4.4.3 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian secara persial (Uji t) membuktikan variabel komposisi komisaris independen menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan. Keefektifan mekanisme komisaris independen dikatakan sebagai indikator independensi dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris independen dikatakan sebagai indikator independensi dewan karena kehadiran komisaris (Meizaroh dan Lueyanda, 2011). Oleh karena itu, adanya komisaris dari luar yang tidak terafialisasi dengan perusahaan diharapkan dapat memberikan saran yang

independen kepada seluruh anggota komisaris perusahaan. Keberadaan komisaris independen sebagai bagian pelaksanaan *good corporate governance* mungkin dapat mempengaruhi praktik pengungkapan resiko perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan Suhardjanto dan Alfni (2009), Asawan (2017).

4.4.4 Pengaruh Komposisi Komite Audit Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian secara persial (Uji t) membuktikan variabel komposisi komite audit independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membantu dewan komisaris untuk memantau pelaksanaan *corporate governance* dan kebijakan strategis bank, komite audit independen belum melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Berapapun jumlah komite audit independen yang dimiliki oleh perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan yang dilakukan perusahaan. Dari nilai koefisien yang negatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa optimalisasi peran komite audit independen pada perusahaan keuangan masih kurang dan belum berfungsi secara optimal. Hasil ini konsisten dengan penelitian dengan peneliti yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Dewi (2011), Astawan (2017).

4.4.5 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit Independen Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko

Berdasarkan hasil pengujian secara persial (Uji t) membuktikan variabel jumlah rapat komite audit independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan. Pertemuan yang diselenggarakan komite audit dengan berbagai macam keahlian seringkali membahas mengenai strategi dan evaluasi pelaksanaan tugas seperti pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, serta pengawasan terhadap tata kelola perusahaan. Menurut Karamanou dan Vafeas (2005), komite audit yang memiliki lebih banyak waktu untuk bertemu akan dapat melakukan proses pemantauan pelaporan perusahaan lebih efisien. Hal tersebut dikarenakan tugas dan tanggungjawab komite audit dalam memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit

dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan prosen pelaporan keuangan perusahaan belum dilaksanakan dengan baik pasal 43 PBI Nomor:8/4/PBI/2006. Berapapun jumlah rapat yang dilaksanakan oleh komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan dewi (2011).

4.4.6 Pengaruh ROE Terhadap Tingkat Pengungkapan Resiko Keuangan

Hasil pengujian secara persial (Uji t) membuktikan variabel ROE berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan resiko keuangan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Semakin besar ROE yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan resiko yang dilakukan karena menunjukan kepada *stakeholder* mengenai kemampuan perusahaan dalam mengefisienkan penggunaan modal didalam perusahaannya. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi serta diikuti dengan resiko yang tinggi pula, akan terdorong untuk mengungkapkan informasi resiko yang semakin luas (Fahmi, 2013). Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Dewi (2011) yang menyatakan besar kecilnya profitabilitas tidak akan mempengaruhi pengungkapan resiko keuangan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan resiko keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2017 sehingga sampel yang digunakan sebanyak 198. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, data dan regresi linier berganda dengan tingkat kepercayaan 95% dan Metode pengumpulan data menggunakan datasekunder dan *purposive sampling* pada penelitian ini alat yang digunakan program SPSS 20. Hasil pengujian dan pembahasan membuktikan variabel independen ukuran dewan komisaris, komposisi komisaris independen, profitabilitas (ROE) mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan sedangkan variabel independen jumlah rapat komisaris independen, komposisi komite audit independen, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan resiko keuangan.

5.2 Saran

Saran – saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Memperpanjang periode pengamatan untuk mendapat hasil penelitian yang lebih bervariasi.
2. Menambahka variabel yang lain selain yang telah digunakan dalam penelitian ini, terutama variabel yang berkaitan dengan variabel *corporate goverance*.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan karakteristik item pengungkapan resiko keuangan yang lebih spesifik untuk masing – masing jenis resiko keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. 2008. *The Role of Corporate Governance in Intellectual Capital Disclosure in Kenyan Listed firms*. www.ssrn.com. (Diakses tanggal 30 oktober 2018)
- Aditya, H., & Wahyu Meiranto. 2015. Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Risk Disclosure*. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol 4, No 4*
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi keempat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Agus, Sartono. 2011. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE. HAL 122
- Aljifri, K., dan K. Hussainey. (2007). *The Determinant of Forward Looking Information in Annual Report of UAE*. *International bussiness Review* 16 (1): 1-26.
- Anggraeni, (2015), Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Earning Power* Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada perusahaan peserta CGPI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2013). *Jurnal FEB*. Unpad.
- Astawan, Made 2017, "Pengaruh corporate governance terhadap financial risk disclosure", *Skripsi*, Universitas Darmajaya. Lampung.
- Belkaoui, A.R. 2000. *Teori Akuntansi*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat
- Brick, E.I. & Chidambaram, N.K. 2007. Board Meetings, Committee Structure and Firm Performance. <http://papers.ssrn.com>. (Diakses tanggal 1 November 2018).
- Cerbioni, F. & Parbonetti, A. 2007. *Exploring The Effects of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnology Companies*. *European Accounting Review*, 16 (4): 791-826.
- Cety, T. & Suhardjanto, D. 2010. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Environmental Performance* di Indonesia. *Makalah*. Dipresentasikan pada *Call for Paper FE UNS* tanggal 3 November 2010.
- Danarti, Dessy. 2011 *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman Dan Nyaman*. Jakarta: G-Media.
- Dewi, Aryane. 2013 *Peran Corporate Governnace Dalam Praktik Risk Disclosure Pada Perbankan*. *Skripsi*, Universitas Negeri Sebelas Maret.

- Effendi, Muh Arief. 2016. *Good Corporate Governance* (teori dan implementasi) :Jakarta. hal:2
- Elzahar, Hany dan Khaled Hussainey. (2012). Determinants Of Narrative Risk Disclosures in UK Interim Report. *The Journal of Risk Finance*, Vol. 13, No. 2, pp. 133 - 147
- Endang, Sayekti & Wiyadi. 2017, “Determinan Financial Risk Disclosure”, *Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.Vol. 19. No.2.
- Ettredge, Johnstone, Stone, & Wang. 2010. *The Effects of Company Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. Review of Accounting Studies, Forthcoming.*
- Evianisa, Hermailinda. 2014, “Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta. Hal :2
- Fathimiyah, Venny, dkk. 2012. “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap *Risk Management Disclosure* (Studi Survei Industri Perbankan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010)”. *Kumpulan Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- FCGI 2011,”Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)”. Jilid 2. FCGI, Jakarta.
- Forum for Corporate Governance ini Indonesia. 2000. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan). <http://fcgi.or.id>. 1 November 2018.
- Forum for Corporate Governace in Indonesia. 2001.Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance. Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, Jilid II.Edisi ke-2. Jakarta. <http://fcgi.org.id>. 1 November 2018
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hegazy, M., and Al-Ghanem, W., 2011. “An Empirical Analysis Of Audit Delays And Timeliness Of Corporate Financial Reporting In Kuwait. *Eurasian Business Review* Volume 1 (2011) 73-90

- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Teori Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Herwidayatmo. 2000. *Implementasi Good Corporate Governance* untuk Perusahaan Publik Indonesia. *Majalah Usahawan*, No. 10 Th XXIX, Oktober 2018.
- Ho, S.S.M., dan K.S. Wong. 2001. *A Study of relationship between corporate governance structure and extent of voluntary disclosure*. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation* 10: 139-156.
- Ichsan Pamungkas, 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Good Corporate Governance Rating*". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Karamanou, S. & Vafeas, N. 2005. The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earning Forecasts: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting Research*, 45(3): 453-482.
- Kasmir, 2017. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan sepuluh. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Khomsiyah. 2003. Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance* Indonesia.
- Kumalasari, P. D dan Astika, I.B.P. 2014. Pengaruh Modal Intelektual Pada Kinerja Keuangan Di Bursa Efek Indonesia. *Journal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Vol. 02. No. 05.
- Luayyi, Sri, 2010. Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal*. Malang: FE Universitas Brawijaya. 199-216
- Mehr & Cammack –A. 2011, *Dasar-dasar Asuransi*, Balai Aksara, Jakarta: hal:112
- Meilani & Wiyadi. 2017. Determinan *Financial Risk Disclosure*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* Vol. 19, No. 2
- Meizaroh, dan J. Lucyanda. 2011. "Pengaruh Corporate Governance dan Konsentrasi Kepemilikan pada Pengungkapan Enterprise Risk Management". *Jurnal SNA*. Vol. 14.
- Mubarok, Muhammad Andi, (2013). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Risiko Dalam Laporan Keuangan Interim. *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Akuntansi, Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.

- Nasution, M. & Setiawan, D. 2007. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Nurkhin, A. 2009. Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Oorschot, L. Van. 2009. *Risk Reporting: An Analysis of German Banking Industry*. <http://oaithesis.eur.nl>. (Diakses Tanggal 25 Oktober 2018).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan
- Priyanto. 2012. Belajar Cepat Olah Data Statistik Dengan SPSS. Yogyakarta: Cv Andi Offest.
- Ruwita, C. (2013). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Risiko Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting Vol.2 No.2*.
- S. Singhvi & Desai. (1971). *An Empirical Analysis of the Quality of Corporate Financial Disclosure. The Accounting Review*. Vol 46, No 1. *American Accounting Association*.
- Suhardjanto, D., Aryane Dewi. 2011. "Pengungkapan Resiko Finansial dan Tata Kelola". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 1
- Suhardjanto, Djoko, Aryane Dewi, Erna Rahmawati, dan Firazonia M. 2012. "Peran *Corporate Governance* dalam Praktik *Risk Disclosure* pada perbankan". *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 9, No.1, pp. 1-96
- Suhardjanto, D., dan A. Anggitarani. 2010. Karakteristik dewan komisaris dan komite audit serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi 14(2)*: 125-139.
- Sofi, Nazila Istna Taures. 2011. "Analisis Hubungan Antara karakteristik Perusahaan Dengan Pengungkapan Risiko". *Skripsi FE Universitas Diponegoro*.
- Solomon, J. F., Norton, S. D., dan Joseph, N. L. (2000). A Conceptual framework for corporate risk disclosure emerging from the agenda for corporate governance reform. *The British Accounting Review*, 447-478.

- Tugiman, Hiro. 2011, *Pandangan Baru Internal Auditing*, Yogyakarta, Kanisius
- Utomo, Y., & Chariri, A. (2014). Determinan Pengungkapan Risiko Pada Perusahaan Nonkeuangan di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1–14.
- Vafeas, N. 2013. Boar Meeting Frequency an Firm Performance, *Journal of Financial Economics* 53.
- Wahyudi. J. 2012. Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance*, Ukuran Dewan Komisaris, dan Tingkat *Cross-Directorship* Dewan Terhadap Nilai Perusahaan. <http://eprints.undip.ac.id>. 30 September 2018.
- Wardhana, Anindhyarta Adi dan Nur Cahyonowati. 2013. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko (Studi Empiris Perusahaan Non keuangan yang Terdaftar Di BEI tahun 2011)”. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 2 Nomor 3 tahun 2013. Halaman 1-14
- Wiratna. 2014. *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru

www.tempo.com

www.idx.co.id

www.ojk.go.id

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PENGUNGKAPAN RESIKO

No	Bank	Non Bank
1	Resiko Kredit	Resiko Strategi
2	Resiko Pasar	Resiko Operasional
3	Resiko Likuiditas	Resiko Aset dan Liabilitas
4	Resiko Operasional	Resiko Kepengurusan
5	Resiko Kepatuhan	Resiko Tata Kelola
6	Resiko Hukum	Resiko Dukungan Dana
7	Resiko Reputasi	Resiko Asuransi
8	Resiko Strategi	Resiko Pembiayaan

LAMPIRAN 2
SAMPEL PERUSAHAAN

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk
2	AGRS	Bank Agris Tbk
3	BBCA	Bank Central Asia Tbk
4	BBHI	Bank Harda Internasional Tbk
5	BBKP	Bank Bukopin Tbk
6	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk
7	BBNI	Bank Negara Indonesia Tbk
8	BBNP	Bank Nusantara Parahyangan Tbk
9	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk
10	BBTN	Bank Tabungan Negara Tbk
11	BBYB	Bank Yudha Bhakti Tbk
12	BCIC	Bank J Trust Indonesia Tbk
13	BDMN	Bank Danamon Tbk
14	BGTG	Bank Ganesha Tbk
15	BJBR	Bank Jabar Banten Tbk
16	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
17	BMRI	Bank Mandiri Tbk
18	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk
19	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk
20	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk
21	BNLI	Bank Permata Tbk
22	BSIM	Bank Sinar Mas Tbk
23	BSWD	Bank Of India Indonesia Tbk
24	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Tbk
25	BVIC	Bank Victoria Internasional Tbk
26	DNAR	Bank Dinar Indonesia Tbk
27	INPC	Bank Artha Graha Internasional Tbk
28	MAYA	Bank Mayapada Internasional Tbk
29	MCOR	Bank China Construction Tbk
30	MEGA	Bank Mega Tbk
31	NAGA	Bank Mitraniaga Tbk
32	NISP	Bank OCBC NISP Tbk
33	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk
34	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
35	ADMF	Adira Dinamika Multi Finance Tbk
36	BBLD	Buana Finance Tbk
37	BFIN	BFI Finance Indonesia Tbk
38	BPFI	Batavia Prosperindo Finance Tbk

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
39	CFIN	Clipan Finance Indonesia Tbk
40	DEFI	Danasupra Erapasific Tbk
41	IMJS	Indomobil Multi Jasa Tbk
42	MFIN	Mandala Multifinance Tbk
43	MGNA	Magna Finance Tbk
44	TIFA	Tifa Finance Tbk
45	TRUS	Trust Finance Indonesia Tbk
46	APIC	Pacifik Strategic Financial Tbk
47	ARTA	Arthavest Tbk
48	KREN	Kresna Graha Investama Tbk
49	PADI	Mina Padi Investama Tbk
50	PANS	Panin Sekuritas Tbk
51	PEGE	Panca Global Securities Tbk
52	TRIM	Trimegah Securities Indonesia Tbk
53	ABDA	Asuransi Bina Dana Arta Tbk
54	AMAG	Asuransi Multi Artha Guna Tbk
55	ASBI	Asuransi Bintang Tbk
56	ASDM	Asuransi Dayin Mitra Tbk
57	ASJT	Asuransi Jaya Tania Tbk
58	ASMI	Asuransi Kresna Mitra Tbk
59	LPGI	Lippo General Insurance Tbk
60	MREI	Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
61	PNIN	Paninvest Tbk
62	VINS	Victoria Insurance Tbk
63	BCAP	MNC Kapital Indonesia Tbk
64	BBFI	Batavia Prosperindo International Tbk
65	GSMF	Equity Devolepment Invesment Tbk
66	SMMA	Sinar Mas Multi Arta Tbk

LAMPIRAN 3

HASIL UJI STAISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PRK	198	,50	1,00	,8553	,17137
UDK	198	2	10	4,33	1,753
RPTDK	198	4	87	17,98	13,241
KKI	198	,25	,80	,5138	,12640
KKAI	198	,25	,71	,3737	,09703
RPTKA	198	2	32	9,15	6,142
ROE	198	-,983	,269	,06286	,140602
Valid N (listwise)	198				

Sumber : Data yang diolah, 2019

LAMPIRAN 4
HASIL UJI ASUMSI KLASIK
UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		198
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,13825485
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,075
	Negative	-,085
Kolmogorov-Smirnov Z		1,191
Asymp. Sig. (2-tailed)		,117

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data yang diolah, 2019

Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,443	,055		8,069	,000		
UDK	,028	,007	,283	3,961	,000	,669	1,495
RPTDK	,001	,001	,115	1,493	,137	,574	1,741
1 KKI	,408	,085	,301	4,796	,000	,865	1,156
KKAI	,083	,120	,047	,695	,488	,742	1,348
RPTKA	,004	,002	,135	1,755	,081	,572	1,748
ROE	-,157	,073	-,129	-2,155	,032	,952	1,051

a. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data yang diolah, 2019

Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,591 ^a	,349	,329	,14041	,785

a. Predictors: (Constant), ROE, KKI, UDK, RPTDK, KKAI, RPTKA

b. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data yang diolah, 2019

Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,234	,030		7,890	,000
UDK	-,006	,004	-,125	-1,515	,131
RPTDK	,000	,001	-,045	-,498	,619
1 KKI	-,054	,046	-,086	-1,182	,239
KKAI	-,145	,065	-,177	-2,246	,026
RPTKA	-,001	,001	-,081	-,902	,368
ROE	7,676E-005	,039	,000	,002	,998

a. Dependent Variable: ARES

Sumber : Data yang diolah, 2019

LAMPIRAN 5

HASIL UJI HIPOTESIS

Hasil Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,443	,055		8,069	,000
UDK	,028	,007	,283	3,961	,000
RPTDK	,001	,001	,115	1,493	,137
KKI	,408	,085	,301	4,796	,000
KKAI	,083	,120	,047	,695	,488
RPTKA	,004	,002	,135	1,755	,081
ROE	-,157	,073	-,129	-2,155	,032

a. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data yang di olah, 2019

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,591 ^a	,349	,329	,14041

a. Predictors: (Constant), ROE, KKI, UDK, RPTDK, KKAI, RPTKA

b. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,020	6	,337	17,078	,000 ^b
Residual	3,766	191	,020		
Total	5,786	197			

a. Dependent Variable: PRK

b. Predictors: (Constant), ROE, KKI, UDK, RPTDK, KKAI, RPTKA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019

**Uji T
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,443	,055		8,069	,000
UDK	,028	,007	,283	3,961	,000
RPTDK	,001	,001	,115	1,493	,137
KKI	,408	,085	,301	4,796	,000
KKAI	,083	,120	,047	,695	,488
RPTKA	,004	,002	,135	1,755	,081
ROE	-,157	,073	-,129	-2,155	,032

a. Dependent Variable: PRK

Sumber : Data yang diolah, 2019